

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian umum tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Kajian umum tindak pidana korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio–corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>1</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan “Korupsi” adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, serta ketidakberesan lainnya. <sup>2</sup>

Perbuatan Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga saat ini Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan menjadi kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus dituntut dan diselesaikan dengan cara cara yang luar biasa ( *Extra ordinary Enforcement* ).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hal. 115

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, ed.2, cet.4*, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.8

<sup>3</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *Meredesain Tindak pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 28

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan khusus. Maka dari itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi, karena pada umumnya hukum pidana umum tidak sanggup untuk menjangkau cakupan tindak pidana korupsi yang begitu luas.<sup>4</sup>

## **2. Kajian umum Jenis Tindak pidana Korupsi di Indonesia**

Mengenai tindak pidana Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada 3(tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism).<sup>5</sup>.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi perbuatan korupsi mendapat cakupan yang cukup luas. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongankan dalam dua golongan, yakni Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta yang terdapat dalam Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai aspek pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 29

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal.56

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) terdapat di dalam ketentuan Bab II dalam pasal 2 sampai dengan 20, dan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 21 sampai dengan 24, dimana masing-masing memiliki unsur-unsur tertentu dan diancam dengan hukuman pidana dan sistem pemidanaan tertentu pula.<sup>6</sup> Untuk selanjutnya mengenai pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi akan dibahas sebagaimana berikut :

#### 1) Pengertian Korupsi tipe Pertama

Pengertian korupsi mengenai tipe pertama ini merupakan pengertian secara umum mengenai tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 UU TIPIKOR<sup>7</sup>. dimana dapat ditarik unsur-unsur delik ataupun perbuatannya sebagai berikut :

- *Setiap orang*  
Kata setiap orang pada dasarnya menunjukan kepada siapa orang sebagai (subjek hukum) yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan / kejadian yang didakwakan tersebut atau mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa<sup>8</sup>.
- *Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*  
Maksud dari perbuatan “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena akibat dari suatu perbuatan yang dapat dilakukan dengan modus operandi seperti berupa : mengambil, memindahbukukan rekening, menjual, membeli, menandatangani perjanjian<sup>9</sup>
- *Bersifat melawan hukum*

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Cet 2, Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hal.33

<sup>7</sup> Lihat pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>8</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indoensia*. Cet 2, Bandung : Alumni, 2011, hal.80

<sup>9</sup> *Loc cit*.

Menurut ketentuan Undang-undang ini, perbuatan “melawan hukum” mencakup perbuatan dalam arti formal maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila suatu perbuatan tersebut dianggap tercela oleh norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana<sup>10</sup>.

- *Dapat merugikan keuangan Negara*

Yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah mengambil sebagian atau seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a) berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik dari tingkat pusat maupun daerah; dan b) berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara<sup>11</sup>

## 2) Pengertian Korupsi tipe Kedua

Pada dasarnya pengertian korupsi tipe Kedua ini merupakan bentuk kejahatan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan yang diatur dalam ketentuan pasal 3 UU TIPIKOR dan dapat ditarik unsur-unsur delik ataupun perbuatannya sebagai berikut <sup>12</sup>:

- *Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*  
Perbuatan “menguntungkan ” disini secara konkret dapat membuat tersangka/terdakwa, oranglain/koleganya, ataupun suatu korporasi memperoleh aspek materiel ataupun immateriel, dimana sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>13</sup>
- *Menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana terkait suatu jabatan atau kedudukan*  
Pada hakikatnya korupsi tipe Kedua ini diterapkan kepada seorang pejabat/pegawai negeri. Karena hanya pegawai negeri yang dapat melakukan

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal.83

<sup>11</sup> *Ibid* hal.88

<sup>12</sup> Lihat pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>13</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Op.Cit* hal.90

penyalahgunaan jabatan, kedudukan dan kewenangan terkait kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UU TIPIKOR

yang dimaksud pegawai negeri meliputi :

- a) Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian.
- b) Pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP
- c) Orang yang menerima gaji/ upah dari keuangan negara/ daerah.
- d) Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah.
- e) orang yang menerima gaji/upah dari korporasi yang menggunakan modal ataupun fasilitas negara atau masyarakat.

Lebih lanjut arti kata “menyalahgunakan kesempatan” disini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan/fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena suatu jabatan atau kedudukan.<sup>15</sup>

- *Dapat merugikan keuangan Negara*  
Di dalam kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” memberikan fleksibilitas kepada jaksa/ penuntut umum tidaklah harus dapat membuktikan kerugian “*keuangan atau perekonomian negara*” karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat<sup>16</sup>.

### 3) Pengertian Korupsi tipe Ketiga

Pada dasarnya bentuk tindak pidana korupsi tipe Ketiga terdapat dalam ketentuan (*pasal 5*) Terkait suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu , (*pasal 6*) Terkait dengan suap pada Hakim dan Advokat, (*pasal 8*) Terkait dengan penggelapan Uang dan Surat berharga yang dilakukan pegawai negeri, (*pasal 9*) Terkait dengan pemalsuan Dokumen yang dilakukan Pegawai negeri, (*pasal 10*) Terkait dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal.91

<sup>15</sup> *Ibid* hal.92

<sup>16</sup> R. Wiyonno, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ed. Cet. 2., Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 21

pegawai negeri yang merusak barang, akta, surat, atau daftar, (*pasal 11*) Terkait dengan penerimaan hadiah atau janji berhubungan dengan kewenangan jabatan, (*pasal 12*) Terkait dengan suap terhadap pegawai Negeri, (*pasal 13*) Terkait dengan suap terhadap pegawai negeri yang mengingat kekuasaan jabatan yang terdapat dalam UU TIPIKOR yang merupakan penarikan dari KUHP.<sup>17</sup>

#### 4) Pengertian Korupsi tipe Keempat

Pada dasarnya jenis korupsi tipe Keempat ini merupakan bentuk kejahatan korupsi yang berupa percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan atau sarana terhadap terjadinya tindak pidana korupsi yang terhadap orang yang berada di luar wilayah indonesia.<sup>18</sup> Jenis tindak pidana korupsi tipe Keempat ini termuat dalam pasal 15 dan 16 UU TIPIKOR<sup>19</sup>

#### 5) Pengertian Korupsi tipe Kelima

Sebenarnya , pengertian jenis korupsi tipe Kelima ini bukan merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat murni, melainkan suatu tindak pidana lain diluar kejahatan korupsi namun masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> Pengertian korupsi tipe Kelima ini terdapat dalam ketentuan pasal 21 yang memuat *perbuatan mencegah , merintang, menghalangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi ,*

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>18</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Op.Cit* hal.98

<sup>19</sup> Lihat pasal 15 dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Op.Cit* hal.100

selanjutnya pasal 22 yang memuat mengenai *tersangka yang tindak memberikan keterangan seluruh hartanya atau sengaja memberikan keterangan palsu*, dan pasal 24 yang memuat mengenai *tindak pidana saksi yang menyebut pelapor tindak pidana korupsi*.<sup>21</sup>

### 1. Kajian umum ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dari segi pengungkapan kasus, tindak pidana dengan banyak peserta relatif lebih sulit dilacak, terutama bila sifatnya tertutup dan melibatkan orang-orang dengan jabatan tertentu, seperti kasus korupsi. Karena tidak mungkin salah seorang pelaku bersedia memberikan keterangan, bila hal itu akan menyeret dirinya sendiri menjadi seorang tersangka/terdakwa. Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan untuk memidana setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pemikiran ini muncul setelah melihat bahwa memidana pelaku utama saja tidaklah cukup. Ternyata ada kalanya tindak pidana hanya dapat terjadi bila beberapa orang bekerja sama atau ada tindakan dari peserta lain di luar si pelaku yang tidak kalah penting dan menentukan untuk terjadinya tindak pidana. Maka pada abad ke-18 diterima ajaran umum tentang penyertaan yang dicetuskan oleh Von Feuerbach<sup>22</sup>. Di dalam ajaran penyertaan (*deelneming, complicity*) tersebut menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan peserta-peserta lain yang terlibat suatu kejahatan di luar pelaku untuk

---

<sup>21</sup> Lihat pasal 21, 22, 24 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>22</sup> Utrecht, "Turut Serta" dalam *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), Dalam Surastini Fitriasih, *Penyertaan*, Makalah. Disampaikan pada penataran Asas-asas Hukum Pidana, Depok, 4-8 mei 2015. Hal.

dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana , seperti yang diatur dalam Pasal 55, 56 dan 57 KUHP.

Maka dengan adanya ajaran penyertaan tersebut terdapat dua kelompok peserta (*deelnemers*) suatu tindak pidana yaitu pelaku dan peserta di luar pelaku. Dalam Pasal 55 dan 56 secara jelas disebutkan bahwa ada lima golongan orang yang dapat terlibat dalam tindak pidana :

1. orang yang melakukan
2. orang yang menyuruh melakukan
3. orang yang turut melakukan
4. orang yang menggerakkan untuk melakukan
5. orang yang membantu melakukan.

Apabila ditinjau dari bentuk-bentuk penyertaannya maka akan ada empat bentuk penyertaan:<sup>23</sup>

1. “menyuruh melakukan”
2. “turut melakukan”
3. “menggerakkan untuk melakukan”
4. “membantu melakukan”

Agar seorang pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut Undang-undang),

---

<sup>23</sup> Van Bemmelen, Ons Stafrecht 1 (Hukum Pidana 1) , diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta), hlm. 264. Dalam Surastini Fitriasih, *Penyertaan*, Makalah. Disampaikan pada penataran Asas-asas Hukum Pidana, Depok, 4-8 mei 2015. Hal.



selanjutnya membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut terdapat unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang terakhir bahwasanya pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pelaku tidaklah mudah. Bahkan hal ini dapat lebih sulit jika dikaitkan dalam konteks penyertaan, dimana permintaan pertanggungjawaban dari seseorang terhadap suatu tindak pidana yang tidak dilakukannya sendiri. Meskipun dalam undang-undang telah disebutkan mengenai ketentuan penyertaan, akan tetapi menurut Utrecht, ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP tidak banyak memberikan kejelasan.<sup>25</sup> Di samping itu, sejarah juga tidak memberikan pegangan yang cukup untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan tentang penyertaan itu. Sehingga mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda dan bertentangan.

Di dalam ketentuan Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan VIII buku ini (buku I KUHP-pen) berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Maka sejalan menurut ketentuan pasal tersebut, ketentuan tentang penyertaan yang diatur dalam bab V KUHP pada dasarnya juga berlaku untuk perundang-undangan pidana lain di luar KUHP. Apabila di dalam perundang-undangan di luar KUHP ini diatur tentang penyertaan yang

---

<sup>24</sup> Van Bemmelen, *Ons Stafrecht 1 Ibid.* Dalam Surastini Fitriasih, *Penyertaan*, Makalah. Disampaikan pada penataran Asas-asas Hukum Pidana, Depok, 4-8 mei 2015. Hal.

<sup>25</sup> Utrecht, “Turut Serta” dalam *Hukum Pidana II, op.cit.* Dalam Surastini Fitriasih, *Penyertaan*, Makalah. Disampaikan pada penataran Asas-asas Hukum Pidana, Depok, 4-8 mei 2015. Hal.

berbeda dengan ketentuan dalam KUHP maka hal ini merupakan perkembangan ajaran penyertaan dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001), perumusan delik penyertaan hanya terdapat dalam 1 pasal, yaitu di dalam pasal 15 yang berbunyi, *“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 5 sampai dengan 14.”*

Di dalam Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang yang membantu suatu kejahatan dipidana sebagaimana halnya pelaku. Hal ini nampak berbeda dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 57 KUHP dimana dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Maka tidak adanya ketentuan lain mengenai delik penyertaan baik mengenai bentuk, syarat, maupun pemidanaan di dalam UU TIPIKOR, dapat disimpulkan bahwa kecuali mengenai pemidanaan terhadap orang yang membantu melakukan, maka ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana korupsi

## **B. Kajian umum tentang Alat bukti**

### **1. Alat bukti dalam KUHP**

Menurut Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Didalam Pasal 184

KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

#### 1. Keterangan Saksi

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut<sup>27</sup>. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, maupun ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>28</sup> Dari batasan yang dijelaskan dalam UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan adalah diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- Bahwa keterangan saksi mengenai diluar dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian.
- Mengenai alasan dari keterangan saksi harus mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan bahwa keterangan dari saksi baru memiliki nilai

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2-3

<sup>27</sup> Lihat pasal 1 angka 26 KUHAP

<sup>28</sup> Lihat pasal 1 angka 27 KUHAP

pembuktian setelah ia menerangkan mengenai sebab- sebab dari pengetahuannya tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.<sup>30</sup> secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli , yakni

- Bahwa apa yang ia terangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya
- Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu haruslah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa<sup>31</sup>.

## 3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 surat yang dapt digunakan sebagai alat bukti , 3 surat harus dikuatkan dengan sumpah dan 1 surat cukup dengan di bawah tangan. adapun yang termasuk surat adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Banyumedia Publishing, 2011, hal 26

<sup>30</sup> Waluyadi, *Pengetahuan dasar hukum acara pidana*, Bandung : Mandar maju, 1999, hal. 108

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.42

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>32</sup>

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki keterkaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya<sup>33</sup>. Jika dicermati lebih lanjut dalam pasal 188 KUHAP maka terdapat beberapa rumusan mengenai alat bukti petunjuk, yakni

- Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian.
- Persesuaian yang dimaksud adalah sesuai antara masing masing perbuatan, kejadian, dan keadaan antara satu sama lain, ataupun sesuai antara perbuatan, kejadian, dan keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- Dari adanya persesuaian tersebut maka menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pembuatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid hal.47

<sup>33</sup> Lihat pasal 188 KUHAP.

<sup>34</sup> Ibid hal.50

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.<sup>36</sup>

##### 5. Keterangan Terdakwa

Yang dimaksud keterangan terdakwa sebagaimana terdapat dalam pasal 194 KUHAP adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang

---

<sup>35</sup> Waluyadi, . *Op cit.* Hal. 108

<sup>36</sup>[http://www.academia.edu/7228559/analisa\\_perluasan\\_alat\\_bukti\\_denganpengaturan\\_hukum\\_acara\\_di\\_luar\\_kuhap](http://www.academia.edu/7228559/analisa_perluasan_alat_bukti_denganpengaturan_hukum_acara_di_luar_kuhap). Diakses Selasa 3 oktober 2017

perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri.<sup>37</sup> Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

## **2. Kajian umum tentang Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam perkembangannya, masing-masing hukum acara di Indonesia memuat ketentuan mengenai alat bukti yang berbeda anatara satu dengan yang lain. Seperti halnya dalam konteks hukum pidana yang mengacu terhadap ketentuan pasal 184 KUHAP. Namun, untuk menanggulangi kejahatan- kejahatan yang bersifat *Extara Ordinary Crimes* seperti halnya dalam Tindak pidana korupsi, terdapat alat bukti tambahan sebagaimana berikut :

### **1. Data elektornik (Informasi dan Dokumen elektronik)**

Dengan adanya ketentuan yang termuat dalam pasal 44 ayat (2) UU TIPIKOR yang menyatakan bahwasanya alat bukti tersebut tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan dengan baik secara biasa

---

<sup>37</sup> Lihat pasal 194 KUHAP

maupun elektronik atau optik. Maka dengan adanya ketentuan tersebut , tidak ada pembatas yang tegas antara alat bukti dan barang bukti.<sup>38</sup> Lebih lanjut, mengenai ketentuan tersebut semakin dikuatkan oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan data elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam sidang pengadilan dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi di dalam UU ITE mengatur 2 syarat mengenai bagaimana Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah menurut hukum. *Pertama*, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. *Kedua*, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.<sup>39</sup>

## 2. Penyadapan

Dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan, karena bertentangan dengan *bewijsvoering* dalam hukum pembuktian. Namun perkembangannya terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyadapan

---

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, ***Teori dan Hukum Pembuktian***, Jakarta : Erlangga, 2012. hal 20

<sup>39</sup> Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012. Diambil dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018.



boleh dilakukan dalam rangka mengungkap suatu kejahatan dengan pertimbangan kejahatan tersebut pembuktiannya sulit dilakukan karena kejahatan tersebut bersifat terorganisir.<sup>40</sup> Dewasa ini dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia, seperti halnya (a) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) undang-undang Narkotika, (c) undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, (d) undang-undang komisi pemberantasan korupsi, penyidik di beri kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara *Under Cover*.<sup>41</sup>

### 3. Kajian umum tentang Bukti Permulaan.

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) hanya memberikan penjelasan mengenai “bukti permulaan yang cukup” pada penjelasan pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1 angka 14 KUHP. Mengenai hal tersebut, pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik<sup>42</sup>. Dengan kata lain tanpa adanya “bukti permulaan yang cukup” penyidik tidak dapat melakukan penangkapan ataupun

---

<sup>40</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* Hal 22

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 157

menetapkan Tersangka. Dalam praktek peradilan pidana terjadi pemberian arti terhadap istilah “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan juga “bukti yang cukup” yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan hukum seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penangkapan atau penahanan. Maka dalam frasa “bukti permulaan yang cukup” harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan penyelidik untuk melakukan penangkapan<sup>43</sup>

Mengenai pengertian terhadap “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” terdapat pengertian yang hampir sama di dalam forum MAHKEJAPOL (Mahkamah Agung-Kejaksaan-Kepolisian) dan di dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Penjelasan mengenai bukti permulaan yang cukup yang dirumuskan berdasarkan hasil rakergab Mahkejapol 1 tahun 1984 halaman 14 memiliki pengertian seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.<sup>44</sup> Berdasarkan Pengenaan ukuran “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan juga “bukti yang cukup” untuk mengartikan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan juga 21 tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru tampak di dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: *“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk*

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*.ed.2, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.113

<sup>44</sup> Harun M. Husein, *penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*, Jakarata : Rineka Cipta, 1991, hal. 112

*menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”.*

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan suatu upaya penangkapan. Hal tersebut juga didukung menurut pendapat Dr. Muhhamad Arief Setiawan mengenai istilah bukti permulaan yang menjelaskan, apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis* yang memberikan penjelasan bahwasanya keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>45</sup> Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Jadi Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

---

<sup>45</sup> Pendapat Dr. Muhhamad Arief Setiawan S.H.,M.H dalam *Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014* mengenai Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP

Untuk memberikan definisi lebih lanjut mengenai bukti apa yang dimaksud mengenai Bukti permulaan yang cukup, perlu dilihat juga di dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur secara tegas mengenai bukti permulaan yang cukup yakni : *“bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurang 2 alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan dengan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.* <sup>46</sup>

Selanjutnya agar mencakup asas kepastian hukum yang adil serta dapat memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta*, terbitlah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatakan bahwa dalam menafsirkan penjelasan mengenai frasa “bukti permulaan ” , “bukti permulaan yang cukup” serta “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Lebih lanjut MK berpendapat pertimbangan yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, tersangka sudah dapat terlebih dahulu memberikan keterangan yang seimbang terhadap minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.

---

<sup>46</sup> Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta : Pusat studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hal. 7

#### 4. **Kajian umum tentang teori pembuktian**

Dalam hal pembuktian, terdapat empat hal terkait konsep pembuktian itu sendiri; *Pertama*, suatu bukti harus relevan dengan sengketa atau pokok perkara yang akan diproses, *Kedua*, suatu bukti harus dapat diterima, *Ketiga*, bukti tersebut harus diperoleh secara legal, *Keempat*, dalam konteks pengadilan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat di evaluasi oleh hakim<sup>47</sup>. Mengacu pada hukum pembuktian yang saat ini kita gunakan , maka sistem pembuktian dapat diartikan sebagai batasan mengenai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling terkait dan berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>48</sup> Adapun sistem pembuktian berisi mengenai alat bukti apa yang dapat digunakan, cara memperoleh alat bukti, dan nilai kekuatan dari alat bukti tersebut yang digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana, serta kriteria/standar yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.<sup>49</sup>

Terdapat enam hal terkait parameter hukum pembuktian yakni ; *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijesvoering*, *bewijlast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*, yang akan dijelaskan lebih dalam sebagai berikut :

##### 1. *Bewijstheorie*

---

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* Hal 15

<sup>48</sup> Adami chazawi, *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*, Malang : Banyumedia publishing, 2013. Hal.19

<sup>49</sup> *Ibid*

Adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan.<sup>50</sup> Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, antara lain :<sup>51</sup>

1) Sistem keyakinan belaka (*Convection in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti diperoleh beserta alasan yang digunakan serta bagaimana membentuk keyakinan tersebut, dan tanpa perlu mempertimbangkan logis/ tidaknya keyakinan hakim.

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Raisonne*)

Dalam sistem ini, meski undang undang telah menyebutkan dan menyediakan mengenai berbagai macam alat bukti, tetapi dalam hal kekuatan dan penggunaan alat bukti tersebut terserah kepada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan yang digunakan dalam pertimbangannya dianggap logis.

3) Sistem pembuktian melalui Undang Undang (*Positief wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa didasarkan semata mata pada alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, baik mengenai alat bukti, ataupun cara penggunaanya hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak

---

<sup>50</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*

<sup>51</sup> Adami chazawi, *ibid*, hal.20-23

pidana telah terbukti, sehingga keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini dianggap tidak penting dan bukan harus menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam menarik kesimpulan.

4) Sistem pembuktian menurut Undang Undang secara terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem pembuktian ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti dan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Jadi untuk menarik kesimpulan, dari kegiatan pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

## 2. *Bewijismiddelen*

Adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum, mengenai apa saja yang menjadi alat bukti yang diatur dalam hukum acara<sup>52</sup>. Dalam konteks hukum pidana, untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) seperti halnya dalam tindak pidana Terorisme dan kejahatan Korupsi, alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan tidak terbatas hanya pada 184 KUHAP semata, namun terdapat juga alat bukti lainnya<sup>53</sup>. Perluasan alat bukti tersebut

---

<sup>52</sup> Eddy O.S Hiariej, *ibid*, hal 19

<sup>53</sup> *Ibid*

mengacu pada segala sesuatu yang dapat membuktikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

### 3. *Bewijesvoering*

Secara harafiah *bewijesvoering* diartikan sebagai penguraian cara mengenai bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan, yang menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalistis sehingga konsekuensinya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.<sup>54</sup> Namun perkembangannya terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur diluar KUHP, pembuktian ini boleh dilakukan dalam rangka mengungkapkan suatu kejahatan dengan pertimbangan kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan pembuktiannya sulit untuk dilakukan.<sup>55</sup>

### 4. *Bewijlast*

*Bewijlast* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.<sup>56</sup> Di dalam konteks perkara pidana secara universal, jaksa penuntut umum maupun terdakwa saling membuktikan di depan persidangan, dimana jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa akan membuktikan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>57</sup> *Ibid*. hal 23



### 5. *Bewijskracht*

*Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian terhadap masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian mengenai terbuktinya suatu dakwaan, dimana Hakimlah yang menentukan dan menilai kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, dan jika bukti tersebut dinilai relevan maka kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah alat bukti tersebut dapat diterima atau tidak.<sup>58</sup> Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki dimana semua alat bukti hakikatnya adalah sama, hanya saja ada ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan yang lain.<sup>59</sup> Oleh karena itu dalam hukum acara pidana terdapat suatu bukti yang bersifat pelengkap dimana bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.<sup>60</sup>

### 6. *Bewijs minimum*

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang digunakan dan diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim, dimana dalam konteks hukum acara pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.<sup>61</sup> Ketentuan minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh indonesia.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hal 25

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.* hal 26

<sup>61</sup> *Ibid.*

### C. Kajian umum tentang Penetapan Tersangka

#### 1. Pengertian umum tentang tersangka

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka memiliki cukup dasar untuk dilakukan pemeriksaan di taraf Persidangan.<sup>62</sup> Selanjutnya pengertian tersangka sebagaimana tercantum dalam KUHAP menyebutkan “*bahwa tersangka adalah yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”.<sup>63</sup> Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa tersangka merupakan seorang yang diduga melakukan suatu perbuatan dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Namun, terhadap tersangka tersebut masih belum terbukti sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut :<sup>64</sup>

- 1) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik

---

<sup>62</sup> J.C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hal.178

<sup>63</sup> Lihat pasal 1 angka 14 KUHAP

<sup>64</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPenyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika. 2007. Hal 330

- 2) Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.
- 3) Jika perlu, dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang. .

Hak hak tersangka sangat penting dilindungi oleh hukum, karena tersangka merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, dan disita barangnya. Oleh karena itu hukum perlu benar benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak hak tersangka tidak dilakukan sewenang-wenang dan berlebihan.<sup>65</sup> Maka untuk melindungi hak hak tersangka guna pembelaan terhadap kepentingan dirinya, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum, serta bebas memilih penasihat hukum dalam tindak pidana tertentu, baik dalam setiap tingkat pemeriksaan maupun dalam setiap waktu yang diperlukan. Bahkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHAP hak untuk mendapat bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib bagi tersangka atau terdakwa, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana pidana :

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman 15 tahun atau lebih

---

<sup>65</sup> Dr. Munir Fuady dan Sylvia Laura L fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group. 2015. Hal. 27

## 2. Pengertian umum Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan suatu bentuk wewenang yang dimiliki penegak hukum untuk memberikan status atau *label* tersangka kepada seseorang yang diduga merupakan pelaku tindak pidana.<sup>66</sup> Lebih lanjut mengenai pengertian penetapan tersangka menurut Andi Hamzah adalah proses dimana perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia telah melanggar suatu delik.<sup>67</sup> Selanjutnya mengenai penetapan tersangka menurut peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) didalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008 hal. 66

<sup>67</sup> Ahmad Ardhy Effendi, *Jurnal Ilmiah : Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi*, 2015. Universitas Narotama Surabaya

jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, dimana dalam prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Lebih lanjut mengenai penetapan tersangka terhadap jenis tindak pidana korupsi, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan tersangka. Bisa kita lihat pada salah satu tugas KPK berdasarkan pasal 6 huruf c Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Secara umum mekanisme penanganan perkara di lembaga ini sama seperti lembaga penegak hukum lain.

Pada saat KPK menangani suatu perkara yang telah masuk tahap penyelidikan, dalam aturanya akan memvalidasi temuan segala informasi yang berkembang, baik informasi yang disampaikan terperiiksa , maupun informasi dari hasil suatu sadapan, dimana validasi tersebut dilakukan dengan cara menelaah hasil temuan tersebut, atau dengan mencocokkan barang bukti yang satu dengan yang lain.<sup>68</sup> Dan setelah itu KPK akan memanggil orang-orang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidikinya berstatus “Terperiiksa”. Setelah temuan-temuan tersebut dirasa memiliki hasil validasi yang jelas, KPK akan melakukan gelar yang akan dihadiri Penyelidik,

---

<sup>68</sup> Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Timur, 2008, hal.31

Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan serta Pimpinan KPK.<sup>69</sup>

Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah dalam melakukan pemeriksaan KPK dapat mengabaikan aturan tertentu ataupun mendapatkan izin dalam melakukan pemeriksaan apabila tersangka yang ditangani KPK adalah seorang Pejabat negara. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menjelaskan bahwa :

*“Dalam hal seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak tanggal penetapan tersebut, maka prosedur yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini ”*

Selanjutnya kewenangan KPK dalam menetapkan seorang saksi menjadi seorang tersangka adalah apabila seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan atau yang awalnya hanya berstatus sebagai Saksi dalam suatu kasus dan KPK memiliki dua alat bukti dan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan sebagai tersangka. Saksi dalam hal ini bisa dituntut juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama tetapi berkas yang baru. Dalam hal menetapkan tersangka berarti tidak bisa sembarangan, harus adanya bukti yang cukup atau minimal dua alat bukti seperti yang sudah dijabarkan di atas.

---

<sup>69</sup> *Ibid*